

**KONTRIBUSI PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PT. BPD SULSELBAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Rifkatul Annisa

NPP. 30.1222

Asdaf Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan

Program Studi Keuangan Publik

Email: 30.1222@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Eko Subowo, MBA

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Regional original revenues are sourced from regional taxes, regional levies, separated regional wealth management results, and other legitimate regional original revenues. The results of separated regional wealth management originate from the results of capital participation by the regional government. Income from wealth management obtained through receiving profits from regionally owned enterprises as a result of equity participation. This revenue contributes to increasing regional original income through efforts to invest capital by the local government. **Purpose:** The purpose of this research is to find out and get an overview of the contribution of equity participation as well as the supporting and inhibiting factors for its implementation. **Method:** This study uses descriptive qualitative methods, the data used are data obtained by observation, interviews, and documentation. **Result:** Based on the results of the study that the contribution of the Regional Government's equity participation in PT. BPD Sulsebar to regional original income in Bulukumba Regency, South Sulawesi Province has not been able to contribute properly to regional original income. **Conclusion:** The contribution of local government equity participation in PT. BPD Sulsebar to local revenue in Bulukumba Regency has not been able to contribute properly. Because until now PT. BPD Sulsebar only pays 2 times for profit sharing, namely in 2017 and 2021.

Keywords: Equity Participation, PT. BPD Sulsebar, Regional Original Income

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bersumber dari hasil penyertaan modal yang dilakukan pemerintah daerah. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan diperoleh melalui laba penerimaan dari badan usaha milik daerah sebagai hasil dari penyertaan modal. Penerimaan tersebut berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui upaya penyertaan modal yang dilakukan pemerintah daerah. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapat gambaran kontribusi penyertaan modal serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, data yang digunakan berupa data yang didapatkan dengan cara obeservasi, wawancara, serta dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian bahwa kontribusi

penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. BPD Sulselbar terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan belum mampu berkontribusi dengan baik terhadap pendapatan asli daerah. **Kesimpulan:** Kontribusi penyertaan modal pemerintah daerah pada PT.BPD Sulselbar terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulukumba belum mampu berkontribusi dengan baik. Karena sampai dengan saat ini PT. BPD Sulselbar hanya menyertorkan 2 kali bagi hasil yaitu pada tahun 2017 dan tahun 2021.

Kata kunci: Penyertaan Modal, PT. BPD Sulselbar, Pendapatan Asli Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah berdasarkan dengan asas-asas penyelenggarannya, yakni asas desentralisasi, asas dekosentrasi, serta asas tugas pembantuan. Dalam desentralisasi ada tiga aspek yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yakni desentralisasi politik, desentralisasi administrasi dan desentralisasi fiskal. Ketiga asas tersebut merupakan komponen utama dalam pelaksanaan desentralisasi dalam rangka membangun daerah dengan mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kemajuan daerah. Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bersumber dari hasil penyertaan modal yang dilakukan pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menjelaskan bahwa kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah. Berikut merupakan rincian pendapatan asli daerah Kabupaten Bulukumba.

Tabel 1. 1

Realisasi Pendapatan Asli Daerah kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2021 (dalam rupiah)

Uraian	Realisasi Anggaran (Rp)		
	2019	2020	2021
Pajak Daerah	31.855.880.730	31.138.613.050	37.864.015.321
Retribusi Daerah	16.668.146.140	14.387.214.516	16.578.048.350
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.193.141.336	4.840.897.279	4.544.098.364
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	119.283.975.942	118.055.284.495	94.250.049.418
Pendapatan Asli Daerah	173.001.144.148	168.422.009.341	153.236.211.453

Sumber: BPKPD Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan

Dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bulukumba menurun setiap tahunnya. Hal yang sama juga dilihat pada penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang menurun. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan diperoleh melalui laba penerimaan dari badan usaha milik daerah sebagai hasil dari penyertaan modal. Penerimaan tersebut berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bulukumba melalui upaya penyertaan modal yang dilakukan pemerintah daerah pada PT. BPD Sulselbar di Kabupaten Bulukumba.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan penyertaan modal terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulukumba dalam hal ini berkaitan dengan kontribusi pelaksanaannya, faktor pendukung serta faktor penghambat pelaksanaannya. Masalah yang menjadi fokus selanjutnya adalah upaya apa yang mungkin dilakukan untuk meningkatkan kontribusi penyertaan modal terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks penyertaan modal maupun pengelolaan kekayaan daerah. Penelitian dengan judul Analisis penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Depok Pada PT. Bank Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) oleh Dian Yudo Palupi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (2011) dengan hasil penelitian Pemerintah Kota Depok menanamkan saham tipe A dan B khusus di Bank BJB yang merupakan Perumda jika sifatnya adalah investasi jangka panjang, pada Prouk perbankan tergolong ke dalam investasi jangka pendek.

Penelitian berjudul Analisis kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Di PT. Bank Sulutgo) oleh Heince Jusva Rumande, Vakie A. Rimate, Debby Ch. Rotinsulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi (2019) dengan hasil penelitian Pendapatan Asli Daerah ternyata mempunyai hubungan yang tidak terlalu besar dengan pembagian dividen badan usaha milik daerah sehingga kontribusi peningkatan yang terjadi pada pembagian dividen masih belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian berjudul Peran BUMD dalam meningkatkan PAD Surabaya (Studi Kasus Kebun Binatang Surabaya) oleh Nurul Ni'matul Usriyah, Dica Dara Ayuningtiyas, Susi Hardjati, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur (2020) dengan hasil penelitian Adanya peran BUMD dari hasil laba terhadap PAD walaupun masih kecil tetapi dapat menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya dalam suatu kota apakah mampu untuk mengembangkan hasil laba dari sektor BUMD.

Penelitian berjudul Efektifitas dan kontribusi laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indragiri Hulu oleh Heriasman, Suwaji, Fakultas Manajemen dan Keuangan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung (2021) dengan hasil penelitian Target PAD belum sepenuhnya dapat direalisasikan, target rasio efektifitas laba BUMD masuk dalam kategori belum efektif.

Penelitian berjudul Pengaruh penyertaan modal daerah terhadap PAD Kabupaten Batu Bara oleh Lucky Satria Pratama, Darwin Damanik, Mipranto, Fakultas Ekonomi Universitas Asahan (2021) dengan hasil penelitian Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Batu Bara kepada PT. Bank Sumut berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni teori yang digunakan penulis dalam penelitian, dari penelitian terdahulu peneliti tidak menemukan kesamaan judul penelitian seperti judul yang diambil penulis. Namun penulis akan mengangkat beberapa penelitian yang pernah diangkat sebagai bahan referensi dalam memperkaya bahan kajian terhadap penelitian yang dilakukan penulis.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kontribusi penyertaan modal, faktor penghambat dan faktor pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan, dan upaya yang dilakukan PT. BPD Sulselbar dan pemerintah daerah untuk berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang digagas oleh Sugiyono (2017: 26) yang menyatakan bahwa metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penulis adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan) , analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan jenis data primer dengan wawancara terstruktur dan sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang telah ada sebelumnya dimana peneliti akan melakukan studi literature dengan mencari data yang dibutuhkan melalui jurnal, buku, berita aktua, ditambah dengan dokumentasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis kontribusi penyertaan modal dengan membagi pembahasan dengan beberapa subbab. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Kontribusi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT. BPD Sulselbar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan

Penulis melakukan pengukuran terhadap kontribusi penyertaan modal dengan memebandingkan jumlah modal yang disertakan dengan hasil yang diterima kembali oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba. Adapun perbandingan tersebut tercantum pada tabel berikut

Tabel 3. 1

Target,Realisasi dan Bagi Hasil Penyertaan Modal

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	DASAR HUKUM PENYERTAAN	TERGET MODAL YANG DITETAPKAN GUBERNUR (Rupiah)	REALISASI JUMLAH MODAL YANG DISETORKAN PEMDA BULUKUMBA (Rupiah)	TOTAL KESELURUHAN MODAL YANG TELAH DISETORKAN (Rupiah)	BAGI HASIL PENYERTAAN MODAL (Rupiah)
1.	2005	SK Nomor : 009/DTR/2005	819.000.000	819.000.000	819.000.000	-
2.	2006	SK Nomor : 036/DTR/2006	1.000.000	1.000.000	820.000.000	-
3.	2006	SK Nomor :	150.000.000	150.000.000	970.000.000	-

		062/DTR/2006				
4.	2008	SK Nomor : 127/DTR/2008	1.000.000.000	1.000.000.000	1.970.000.000	-
5.	2012	SK Nomor : 203/GTR/2012	1.244.000.000	1.244.000.000	3.214.000.000	-
6.	2014	SK Nomor : 244/GTR/2014	2.000.000.000	2.000.000.000	5.214.000.000	-
7	2015	SK Nomor : 261/GTR/2015	1.000.000.000	1.000.000.000	6.214.000.000	-
8.	2016	SK Nomor : 277/GTR/2016	1.001.000.000	1.001.000.000	7.215.000.000	-
9.	2017	SK Nomor : 294/GTR/2017	3.000.000.000	3.000.000.000	10.215.000.000	3.273.064.494
10	2018	SK Nomor : 302/GTR/2018	4.000.000.000	4.000.000.000	14.215.000.000	-
11	2021	SK Nomor : 367/DKA/2021	6.205.000.000	6.205.000.000	20.420.000.000	4.544.098.364

Sumber: Badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah Kabupaten Bulukumba

Berdasarkan tabel 3.1 mengenai target,realisasi dan bagi hasil penyertaan modal dari tahun 2005-2021, Pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba telah memenuhi target yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Rata-rata realisasi setiap tahunnya telah mencapai 100%, walaupun Pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba hanya memperoleh 2 kali bagi hasil dari PT.BPD Sulselbar yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp. 3.273.064.494 dan tahun 2021 sebesar Rp. 4.544.098.364. Penyertaan modal pada PT. BPD Sulselbar belum mampu berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, PT. BPD Sulselbar Kabupaten Bulukumba.

3.2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Pada PT. BPD Sulselbar

Penulis melakukan observasi dan wawancara di lingkungan Pemerintah Daerah maupun PT. BPD Sulselbar untuk mendapatkan faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan penyertaan modal. Faktor pendukung pelaksanaan penyertaan modal adalah ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba sehingga dapat memberikan tambahan modal pada PT. BPD Sulselbar secara rutin setiap tahunnya. Adapun faktor penghambat pada penyertaan modal pemerintah daerah adalah kualitas pelayanan pegawai PT.BPD Sulselbar kepada masyarakat yang masih kurang baik dan adanya sikap mental pegawai PT. BPD Sulselbar yang kurang baik mengakibatkan terjadinya kasus penyelewengan dana contohnya kasus kredit fiktif pada tahun 2021.

3.3. Upaya yang dilakukan PT. BPD Sulselbar dan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan

Meningkatkan kualitas pelayanan pegawai PT. BPD Sulselbar dan sehingga apabila kualitas pelayanan baik, maka akan mendukung PT. BPD Sulselbar Kabupaten Bulukumba dalam meningkatkan pendapatan karena terdapat peningkatan jumlah nasabah dan Pihak PT. BPD Sulselbar lebih memperhatikan beberapa ketentuan yang menjadi syarat dalam proses perekrutan pegawai. Perekrutan pegawai yang berkompeten di bidang perbankan dan pegawai yang berintegritas memiliki tujuan yaitu dapat meningkatkan kualitas bank.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba, Modal yang diterima oleh PT. BPD Sulselbar digunakan untuk membeli asset dan kegiatan perluasan bisnis sebagai upaya meningkatkan produktivitas sektor bisnis bank. Karena sebagai BUMD PT. BPD Sulselbar memiliki dua tanggung jawab untuk memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial kepada masyarakat. PT. BPD Sulselbar memiliki fungsi sebagai bank pelayanan publik yang menyediakan pelayanan di bidang perbankan. Selain untuk memberikan deviden dalam membantu meningkatkan pendapatan asli daerah, PT. BPD Sulselbar tidak hanya berorientasi untuk menciptakan keuntungan sebesar-besarnya tetapi juga mempunyai orientasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. PT. BPD Sulselbar juga terus melakukan inovasi terbaru guna meningkatkan kapabilitas bank. PT. BPD Sulselbar juga lebih memperhatikan kualitas pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang secara tidak langsung hal ini juga berkaitan dengan kinerja pegawai PT. BPD Sulselbar sehingga harus memperhatikan beberapa ketentuan yang menjadi syarat dalam proses perekrutan pegawai bank Sulselbar.

4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat pelaksanaan penyertaan modal pemerintah daerah pada PT. BPD Sulselbar adalah adanya sikap mental pegawai PT. BPD Sulselbar yang kurang baik mengakibatkan terjadinya kasus penyelewengan dana contohnya kasus kredit fiktif pada tahun 2021 senilai 25 miliar rupiah yang dilakukan oleh salah satu pegawai PT. BPD Sulselbar yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa kontribusi penyertaan modal pemerintah daerah pada PT. BPD Sulselbar terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulukumba belum mampu berkontribusi dengan baik. Karena sampai dengan saat ini PT. BPD Sulselbar hanya menyetorkan 2 kali bagi hasil yaitu pada tahun 2017 dan 2021. Guna meningkatkan kontribusi penyertaan modal terhadap pendapatan asli daerah, disarankan untuk sebaiknya memberikan pelatihan kepada pegawai PT. BPD Sulselbar dengan melatih kemampuan pegawainya dalam memberikan pelayanan kepada nasabah karena kualitas pelayanan yang baik sangat diperlukan agar nasabah puas dengan pelayanannya dan menjadikan nasabah lebih memilih PT. BPD Sulselbar untuk menyimpan uang mereka sehingga apabila nasabah bertambah maka pendapatan PT. BPD Sulselbar juga ikut bertambah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan kesediaan akses informasi pada bank.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penyertaan modal pemerintah daerah sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba serta Direksi PT. BPD sulselbar yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Heriasman dan Suwaji. 2021. *“Efektifitas dan Kontribusi Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indragiri Hulu”*. Jurnal Manajemen dan Keuangan. Vol.9. STIE Sultan Agung.
<http://bpkd.bulukumbakab.go.id/> Diakses pada tanggal 19 Agustus 2022
<https://bulukumbakab.bps.go.id> Diakses pada tanggal 1 Maret 2023
- Palupi, Dian Yudo. 2011. *“Analisis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Pada PT. Bank Jawa Barat dan Banten (Bank BJB)”*. Bogor: Institut Pertanian Bogor
- Pratama, L.S. dan D. Damanik. 2021. *“Pengaruh Penyertaan Modal Daerah Terhadap PAD Kabupaten Batu Bara”*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol.3. Universitas Simalungun.
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT Bank Sulselbar dan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bulukumba
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
- Rumande, H. J. dan V. Rumate. 2019. *“Analisis Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Di PT. Bank Sulutgo)”*. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah. Vol.20. Universitas Sam Ratulangi.
- Sugiyono 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Usriyah, N.N. dan D. Ayuningtiyas. 2020. *“Peran BUMD Dalam Meningkatkan PAD Surabaya (Studi Kasus Kebun Binatang Surabaya)”*. Jurnal Sosial Ekonomi dan Politik. Vol.1. Universitas Pembangunan Nasional Veteran.